

LAMPIRAN  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR PER- /PJ/2021  
TENTANG  
JENIS PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN  
KEWAJIBAN PERPAJAKAN SECARA  
ELEKTRONIK, PERSYARATAN DOKUMEN  
ELEKTRONIK YANG HARUS DILAMPIRKAN,  
TANDA TANGAN ELEKTRONIK YANG  
DIGUNAKAN, TATA CARA PENYAMPAIAN  
DOKUMEN ELEKTRONIK DAN SALURAN YANG  
DIGUNAKAN, SERTA TATA CARA TINDAK LANJUT  
ATAS PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN  
KEWAJIBAN PERPAJAKAN SECARA ELEKTRONIK

- A. Daftar Jenis Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Secara Elektronik Beserta Dokumen yang Diperkirakan  
Dalam Rangka Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Secara Elektronik

No	Jenis Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan	Saluran Penyampaian	Penindaklanjutan	Dokumen yang Diperkirakan
1	Permintaan kembali Kartu NPWP, Surat Keterangan Terdaftar (SKT), dan/atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan Sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
2	Aktivasi Sertifikat Elektronik	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan Sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

3	Permohonan Sertifikat Elektronik PSrE	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan serta Penerbitan, Penandatanganan, dan Pengiriman Keputusan atau Ketetapan Pajak secara Elektronik.
4	Surat Kuasa Khusus	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan Sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa; dan 2. Ketentuan yang mengatur tentang Surat Kuasa Khusus.
5	Pembayaran dan Penyetoran Pajak	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan Sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	1. Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik; 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak secara Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PER-10/PJ/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan.
6	Laporan Biaya Penelitian dan Pengembangan terkait Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia.



7	Laporan Pemanfaatan Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto terkait Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia.
8	Pelaporan Realisasi Insentif Pembebasan dari Pemungutan PPh Pasal 22 Impor untuk WP terdampak COVID-19	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
9	Surat Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan Sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.
10	Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan Sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

				<ol style="list-style-type: none"><li>2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26;</li><li>3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi; dan</li><li>4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.</li></ol>
11	Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 22	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan Sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.03/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah;</li><li>2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</li></ol>

				<p>di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010/2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman;</li><li>4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2015 tentang Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya;</li><li>5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.</li></ol>
12	Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23/26	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan</li></ol>

		dengan Sistem administrasi DJP		<p>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2015 tentang Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya;</li><li>3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan /atau Pasal 26; dan</li><li>4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.</li></ol>
--	--	--------------------------------	--	--

f

13	Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 15	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan Sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2015 tentang Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya; dan 3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.
14	Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 25	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 sebagaimana telah

f

		dengan Sistem administrasi DJP		beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.
15	Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 4(2)	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan Sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan; 3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2015 tentang Pencabutan

				<p>Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya; dan</p> <p>4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.</p>
16	Pelaporan SPT Masa PPN 1111	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan Sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	<p>Jenis dokumen mengikuti ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;</li><li>2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2015 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN); dan</li><li>3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara</li></ol>

f



				Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.
17	Pelaporan SPT Masa PPN 1111DM	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan Sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;</li> <li>2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-45/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) bagi Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan; dan</li> <li>3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.</li> </ol>
18	Pelaporan SPT Masa PPN 1107 Pemungut	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan Sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021</li> </ol>

				<p>tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan</p> <p>2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-147/PJ/2006 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) bagi Pemungut PPN.</p>
19	Pelaporan SPT Tahunan PPh 1771	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan Sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	<p>Jenis dokumen mengikuti ketentuan:</p> <p>1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan</p> <p>2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.</p>
20	Pelaporan SPT Pembetulan	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan Sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	<p>Jenis dokumen mengikuti ketentuan:</p> <p>1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020</p>

f

				<p>tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/ Pemungutannya; dan</li><li>3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.</li></ol>
21	Laporan Pengalihan dan Realisasi Investasi Harta Tambahan dan Laporan Penempatan Harta Tambahan yang Berada di dalam Wilayah NKRI	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan Sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.03/2017; dan</li><li>2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2017 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pengawasan Harta Tambahan Dalam Rangka Pengampunan Pajak sebagaimana diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2018.</li></ol>

f

22	PKP Toko Retail yang Berpartisipasi Dalam Skema Pengembalian PPN Kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan Sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri; dan 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Kewajiban Pengusaha Kena Pajak Toko Retail yang Berpartisipasi dalam Skema Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai kepada Turis Asing.
23	Surat Keterangan Fiskal	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan Sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal.
24	Permohonan SKB Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya telah Disahkan oleh Menteri Keuangan	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2020 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia Yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun Yang Pendiriannya Telah Disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah Mendapatkan Izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
25	Surat Keterangan Bebas PPN atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis (bagi PKP yang menghasilkan BKP dan PKP Pemilik	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan

f

	Proyek yang bekerjasama dengan Penyedia Pekerjaan EPC yang mendapat Fasilitas Pembebasan Bea Masuk)			<p>Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;</p> <p>2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis, Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang telah Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang Digunakan Tidak Sesuai dengan Tujuan Semula atau Dipindahtangankan, dan Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.</p>
26	Perubahan RKIP Barang Strategis	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis, Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang telah Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang

f

				Digunakan Tidak Sesuai dengan Tujuan Semula atau Dipindahtangankan, dan Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.
27	Surat Keterangan Tidak Dipungut	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 50 TAHUN 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai; dan 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai.
28	Pembatalan Surat Keterangan Tidak Dipungut	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 50 TAHUN 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai; dan 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

†

29	Rencana Kebutuhan Impor dan Perolehan Perubahan	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 50 TAHUN 2019 tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai; dan 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai.
30	Surat Keterangan Domisili SPDN	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2018 tentang Surat Keterangan Domisili bagi Subjek Pajak dalam Negeri Indonesia dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.
31	Nomor Seri Faktur Pajak	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembedulan atau Penggantian Faktur Pajak; dan 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, ukuran, tata cara pengisian keterangan, prosedur pemberitahuan dalam rangka pembuatan, tata cara pembedulan atau penggantian, dan tata cara pembatalan faktur pajak.

f



	Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan atau Perubahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2017 tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.
33	Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Status Wajib Pajak dalam Rangka Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atas Layanan Publik Tertentu pada Instansi Pemerintah.
34	Pemberian Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean (SKJLN)	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2017 tentang Impor Sementara; dan 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2019 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean atas Impor yang Merupakan Pemasukan Barang yang Digunakan untuk Kegiatan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak.

f

35	Pemberian Surat Keterangan Memenuhi Kriteria Sebagai Wajib Pajak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu; dan 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
36	Pemberitahuan DPP Nilai Lain Produk Pertanian	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu.
37	Pemberitahuan DPP Harga Jual Produk Pertanian	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2020 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu.
38	Laporan Per Negara (CbCR)	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya.
39	<i>Electronic Taxpayer Account (e-TPA)</i>	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan

f

		dengan sistem administrasi DJP		Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 Tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak <i>Online</i>
40	Konfirmasi Dokumen	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	-
41	Konfirmasi NTPN	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.
42	Pemberitahuan Memilih Dikenai Ketentuan Umum PPh	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu; dan 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
43	Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk WP terdampak COVID-19	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

f

		dengan sistem administrasi DJP		Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
44	Insentif Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 untuk WP terdampak COVID-19	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
45	Insentif Pembebasan dari Pemungutan PPh Pasal 22 Impor untuk WP terdampak COVID-19	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor

f

				110/PMK.03/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
46	Fasilitas Pembebasan dari Pemungutan PPh Pasal 22 Dalam Negeri terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Penanganan COVID-19	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.03/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak Terhadap Barang Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Sumber Daya Manusia Di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
47	Fasilitas Pembebasan dari Pemungutan PPh Pasal 23 terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Penanganan COVID-19	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

f

		dengan sistem administrasi DJP		Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.03/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak Terhadap Barang Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Sumber Daya Manusia Di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
48	Pelaporan Realisasi Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk WP terdampak COVID-19	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.

f

49	Pelaporan Realisasi Insentif PPh Final UMKM DTP untuk WP terdampak COVID-19	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
50	Pelaporan Realisasi Fasilitas Pembebasan dari Pemungutan PPh Pasal 22 Dalam Negeri terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Penanganan COVID-19	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan Sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.03/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019

f



				(COVID-19), Peraturan Menteri Keuangan 83/PMK.03/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020 Tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak Terhadap Barang Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Sumber Daya Manusia Di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
51	Pelaporan Realisasi Insentif Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25 untuk WP terdampak COVID-19	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan Sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021, dan

↓

				Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
52	Pelaporan Realisasi Fasilitas PPN DTP terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Penanganan COVID-19	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan Sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.03/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak Terhadap Barang Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Sumber Daya Manusia Di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 Tentang

f

				Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
53	Fasilitas Pembebasan dari Pemungutan PPh Pasal 22 Impor terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Penanganan COVID-19	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan Sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.03/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak Terhadap Barang Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Sumber Daya Manusia Di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

f

54	Pelaporan Realisasi Fasilitas Pembebasan dari Pemungutan PPh Pasal 22 Impor terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Penanganan COVID-19	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan Sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.03/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak Terhadap Barang Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Bagi Sumber Daya Manusia Di Bidang Kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
55	Bukti Potong PPh Masa Unifikasi Umum	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2020 tentang Bentuk dan Tata

f

		dengan Sistem administrasi DJP		Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi, Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER - 24/PJ/2021 tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi.
56	Laporan Realisasi Investasi	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan Sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
57	Daftar rincian penyerahan kendaraan bermotor tertentu (PMK Nomor 31/PMK.10/2021)	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan Sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 Tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021.

f

58	SPT Masa Unifikasi Instansi Pemerintah	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak, serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Bagi Instansi Pemerintah.
59	Pendaftaran Nomor Identitas Subunit Organisasi Instansi Pemerintah	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Penggunaan Nomor Identitas Subunit Organisasi Instansi Pemerintah Serta Kewajiban Pelaporan Pajak Instansi Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PER-13/PJ/2021.
60	Perubahan data Subunit Organisasi Instansi Pemerintah	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Penggunaan Nomor Identitas Subunit Organisasi Instansi Pemerintah Serta Kewajiban Pelaporan Pajak Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PER-13/PJ/2021.
61	Pelaporan Realisasi PPN DTP (PMK No 239/PMK.03/2020)	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka

1

				Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
62	SKB PPh Pasal 22 (PMK No 239/PMK.03/2020)	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak Terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
63	Laporan Realisasi dari Pembebasan Pemungutan PPh Pasal 22 Impor (PMK No 239/PMK.03/2020)	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak Terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
64	Laporan Realisasi dari Pembebasan Pemungutan PPh Pasal 22 (PMK No 239/PMK.03/2020)	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan Sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2021 tentang Pemberian Insentif Pajak Terhadap Barang yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan



				Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan bagi Sumber Daya Manusia di Bidang Kesehatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
65	Laporan Realisasi Fasilitas Pembebasan Pemotongan PPh Pasal 21 Dalam Rangka Penanganan COVID-19	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan Sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Didease 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
66	SKB PPh Pasal 23 (PMK No 239/PMK.03/2020)	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan Sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak

f

				Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
67	Pelaporan Realisasi Fasilitas Pembebasan dari Pemungutan PPh Pasal 23 terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan Dalam Penanganan COVID-19	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan Sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Didease 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
68	SPT Pemungut Bea Meterai	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan Sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2021 tentang Penetapan Pemungut Bea Meterai dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Bea Meterai.
69	Fasilitas PPh Pasal 21 DTP (PMK 9/PMK.03/2021)	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 sebagaimana telah diubah

f

		dengan sistem administrasi DJP		dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
70	Fasilitas Pengurang PPh Pasal 25 (PMK 9/PMK.03/2021)	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021.
71	SKB PPh Pasal 22 Impor (PMK 9/PMK.03/2021)	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021.
72	Laporan Realisasi PPh Pasal 21 DTP (PMK 9/PMK.03/2021)	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021.
73	Laporan Realisasi PPh Final DTP (PMK 9/PMK.03/2021)	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021.

t

74	Laporan Realisasi PPh Final P3TGAI DTP (PMK 9/PMK.03/2021)	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021.
75	Laporan Realisasi Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 (PMK 9/PMK.03/2021)	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021.
76	Laporan Realisasi Pembebasan PPh Pasal 22 Impor (PMK 9/PMK.03/2021)	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2021.
77	Daftar rincian penyerahan kendaraan bermotor tertentu / Laporan Realisasi PPnBM DTP Periode 2 (PMK 31/PMK. 010/2021)	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2021 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.010/2021.
78	Fasilitas PPh Pasal 21 DTP (PMK 82/PMK.03/2021)	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk

		dengan sistem administrasi DJP		Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021.
79	Fasilitas Pengurang PPh Pasal 25 (PMK 82/PMK.03/2021)	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2021.
80	SKB PPh Pasal 22 Impor (PMK 82/PMK.03/2021)	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
81	Permohonan Kode Otorisasi DJP	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 63/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan serta Penerbitan, Penandatanganan, dan Pengiriman Keputusan atau Ketetapan Pajak secara Elektronik.
82	Pemberitahuan Perubahan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 63/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan serta Penerbitan,

f

				Penandatanganan, dan Pengiriman Keputusan atau Ketetapan Pajak secara Elektronik.
83	SKB PPnBM BKP Mewah Selain Kendaraan Bermotor	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 96/PMK.03/2021 tentang Penetapan Jenis Barang Kena Pajak Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengecualian Pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
84	Pelaporan Tanda Bukti Penerimaan Sumbangan WP Pertambangan Mineral	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 62/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pelibatan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pembebanan Sumbangan dan/atau Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Wajib Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Mineral.
85	Surat Keterangan Penyelenggaraan Pembukuan dengan Stelsel Kas untuk Tujuan Perpajakan	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 54/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria Tertentu serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan.
86	Pelaporan SPOP Pembetulan	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 48/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan.

87	Surat Pemberitahuan Penundaan Penyampaian SPOP	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 48/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan.
88	Permohonan SKB PPh Pasal 21/Pasal 22 selain impor, Pasal 22 impor/PPh Pasal 23	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	Petugas pada <i>Back Office Contact Center</i>	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 sebagaimana diubah dengan PER-21/PJ/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain.
89	SKB PPh Pasal 22 atas Impor Emas Batangan dari Wajib Pajak yang Bergerak dalam Bidang Industri Perhiasan Emas untuk Tujuan Ekspor	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	Petugas pada <i>Back Office Contact Center</i>	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 34/PMK.010/2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman; dan 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain .
90	Surat Keterangan Bebas PPN atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi	Petugas pada <i>Back Office Contact Center</i>	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali



	dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu	dengan sistem administrasi DJP		<p>diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Impor dan Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.03/2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai;</li><li>3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2003 tentang Tata Cara Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu; dan</li><li>4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibeaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis, Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibeaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang Digunakan Tidak Sesuai dengan Tujuan Semula atau Dipindahtangankan, dan Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.</li></ol>
--	--	--------------------------------	--	--

f



91	Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah (perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia)	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	Petugas pada <i>Back Office Contact Center</i>	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
92	Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah (BUMN dan BUMD)	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	Petugas pada <i>Back Office Contact Center</i>	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
93	Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah (Mitra Utama Kepabeanaan (MITA))	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	Petugas pada <i>Back Office Contact Center</i>	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
94	Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah (Operator Ekonomi Bersertifikat / <i>Authorized Economic Operator (AEO)</i> )	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi	Petugas pada <i>Back Office Contact Center</i>	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

		dengan sistem administrasi DJP		Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
95	Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah (pabrikasi atau produsen yang memiliki tempat untuk melakukan kegiatan produksi)	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	Petugas pada <i>Back Office Contact Center</i>	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
96	Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah ( <i>Special Purpose Company</i> atau KIK Skema Tertentu)	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	Petugas pada <i>Back Office Contact Center</i>	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak; dan</li> <li>2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2021 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah dan Pelaksanaan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Terhadap Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, dan Pengusaha Kena</li> </ol>

				Pajak Berisiko Rendah serta <i>Special Purpose Company</i> atau Kontrak Investasi Kolektif sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
97	Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah (Pedagang Besar Farmasi)	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	Petugas pada <i>Back Office Contact Center</i>	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
98	Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah (Distributor Alat Kesehatan)	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	Petugas pada <i>Back Office Contact Center</i>	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
99	Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah (Anak BUMN)	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	Petugas pada <i>Back Office Contact Center</i>	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

100	Surat Keterangan Bebas PPnBM atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Ambulan, Kendaraan Jenazah, Kendaraan Pemadam Kebakaran, Kendaraan Tahanan, dan Kendaraan Angkutan Umum	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	Petugas pada <i>Back Office Contact Center</i>	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2021 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
101	Surat Keterangan Bebas PPnBM atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Protokoler Kenegaraan, Kendaraan Dinas atau Kendaraan Patroli TNI/Polri	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	Petugas pada <i>Back Office Contact Center</i>	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2021 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
102	Permohonan Perubahan Metode Pembukuan	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	Petugas pada <i>Back Office Contact Center</i>	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha; dan 2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
103	Permintaan Perubahan Tahun Buku Pertama	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi	Petugas pada <i>Back Office Contact Center</i>	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan

f

		dengan sistem administrasi DJP		<p>Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha; dan</p> <p>2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-206/PJ/2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.</p>
104	Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	Petugas pada <i>Back Office Contact Center</i>	<p>Jenis dokumen mengikuti ketentuan:</p> <p>1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan</p> <p>2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan.</p>
105	Permintaan Perubahan Metode Pembukuan dan/atau Tahun Buku Kedua, dan Seterusnya	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi	Petugas pada <i>Back Office</i> KP2KP/KPP/Kanwil DJP	<p>Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan</p>

f

		dengan sistem administrasi DJP		dalam Tahun Berjalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.
106	Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	Petugas pada <i>Back Office</i> KP2KP/KPP/Kanwil DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: 1. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-537/PJ/2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Pajak Berjalan dalam Hal-hal Tertentu; dan 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018 tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.
107	Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Petugas pada <i>Back Office</i> KP2KP/KPP/Kanwil DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2018 tentang Penghitungan Angsuran Pajak Penghasilan dalam Tahun Pajak Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa, Wajib Pajak Lainnya yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala dan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu.

f

108	Angsuran atas Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Petugas pada <i>Back Office</i> KP2KP/KPP/Kanwil DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan; dan 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan.
109	Pemindahbukuan (Pbk)	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Petugas pada <i>Back Office</i> KP2KP/KPP/Kanwil DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; dan 2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-522/PJ/2002 tentang Pelaksanaan Teknis Tata Cara Pemindahbukuan atas Kekeliruan Pembayaran Pajak Penghasilan dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat.
110	Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Petugas pada <i>Back Office</i> KP2KP/KPP/Kanwil/kantor pusat DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja,

f



	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berbasis Kompetensi Tertentu			Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu.
111	Fasilitas Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Petugas pada Back Office KP2KP/KPP/Kanwil/kantor pusat DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.010/2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia.
112	Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal pada Industri Padat Karya	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Petugas pada Back Office KP2KP/KPP/Kanwil/kantor pusat DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Penghasilan Neto atas Penanaman Modal Baru atau Perluasan Usaha Pada Bidang Usaha Tertentu yang Merupakan Industri Padat Karya.
113	Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	Petugas pada <i>Back Office</i> KP2KP/KPP/Kanwil DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha; dan 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku atas

f



				Pengalihan dan Perolehan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha.
114	Izin Menyelenggarakan Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Dollar Amerika Serikat (Selain PMA, BUT)	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	Petugas pada <i>Back Office</i> Kanwil DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2020 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian, Pembatalan serta Permohonan dan Penerbitan Kembali Izin Penyelenggaraan Pembukuan atau Pencatatan dengan Menggunakan Bahasa Inggris atau Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat.
115	Izin Menyelenggarakan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Indonesia dan Satuan Mata Uang Rupiah	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	Petugas pada <i>Back Office</i> Kanwil DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2020 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian, Pembatalan serta Permohonan dan Penerbitan Kembali Izin Penyelenggaraan Pembukuan atau Pencatatan dengan Menggunakan Bahasa Inggris atau Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat.
116	Penerbitan Kembali Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dollar Amerika Serikat	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	Petugas pada <i>Back Office</i> KP2KP/KPP/Kanwil DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2020 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian, Pembatalan serta Permohonan dan Penerbitan Kembali Izin Penyelenggaraan Pembukuan atau Pencatatan dengan Menggunakan Bahasa Inggris atau Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa

f

				Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat.
117	Pemusatan Tempat PPN Terutang	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	Petugas pada <i>Back Office</i> KP2KP/KPP/Kanwil DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: 1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2020 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang; dan 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-07/PJ/2020 tentang Tempat Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya.
118	Penambahan dan/atau Pengurangan Pemusatan Tempat PPN Terutang	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	Petugas pada <i>Back Office</i> KP2KP/KPP/Kanwil DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2020 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
119	Perubahan Tempat Pemusatan PPN Terutang	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi	Petugas pada <i>Back Office</i>	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2020 tentang Penetapan Satu

f

		dengan sistem administrasi DJP	KP2KP/KPP/Kanwil DJP	Tempat atau Lebih sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
120	Pencabutan Pemusatan Tempat PPN Terutang	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	Petugas pada <i>Back Office</i> KP2KP/KPP/Kanwil DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2020 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
121	Surat Keterangan Bebas PPN atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis (bagi Penyedia Pekerjaan EPC yang bekerjasama dengan Pemilik Proyek yang mendapat Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan bagi PKP yang tidak mendapat Fasilitas Pembebasan Bea Masuk)	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	Petugas pada <i>Back Office</i> KP2KP/KPP/Kanwil DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; dan 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis, Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang telah Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang Digunakan Tidak Sesuai dengan Tujuan Semula atau Dipindahtangankan, dan Pengenaan Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.
122	<i>Endorsement</i> atas Pemasukan Barang Kena Pajak Berwujud dari	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi	Petugas pada <i>Back Office</i>	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2012 sebagaimana telah

	Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) ke Kawasan Bebas	dengan sistem administrasi DJP	KP2KP/KPP/Kanwil DJP	<p>beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 173/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pembayaran, Pelunasan, Dan Pengadministrasian Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Dan/Atau Ke Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas;</p> <p>2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-125/PJ/2018 tentang Penugasan Pejabat/Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka Pengawasan atas Pemasukan Barang dari Tempat Lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun; dan</p> <p>3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2018 tentang Bentuk, Warna, Ukuran dan Pedoman Pelekatan dan/atau Pemasangan Tanda Pengaman Sehubungan dengan Pemasukan Barang Asal Tempat Lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas yang Akan Dilakukan Pemeriksaan Fisik.</p>
123	Endorsement atas Pemasukan Barang Kena Pajak Berwujud dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) ke Kawasan Bebas Sabang	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	Petugas pada <i>Back Office</i> KP2KP/KPP/Kanwil DJP	<p>Jenis dokumen mengikuti ketentuan:</p> <p>1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PMK Nomor 173/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pembayaran, Pelunasan, Dan Pengadministrasian Pajak Pertambahan</p>

f

				<p>Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Dan/Atau Ke Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas;</p> <p>2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pembayaran, Pelunasan, Dan Pengadministrasian Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Dan/Atau Ke Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas;</p> <p>3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-126/PJ/2018 tentang Penugasan Pejabat/Pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka Pengawasan atas Pemasukan Barang Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang; dan</p> <p>4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2018 tentang Bentuk, Warna, Ukuran dan Pedoman Pelekatan dan/atau Pemasangan Tanda Pengaman Sehubungan dengan Pemasukan Barang Asal Tempat Lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas yang Akan Dilakukan Pemeriksaan Fisik.</p>
--	--	--	--	---

f

124	Pemberitahuan Informasi Layanan Publik	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	Petugas pada <i>Back Office</i> KP2KP/KPP/Kanwil DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.
125	Permohonan Penundaan Pencatatan Beban Kerugian atas Kejadian Luar Biasa	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	Petugas pada <i>Back Office</i> KP2KP/KPP/Kanwil DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
126	Pengaduan Pelayanan Perpajakan	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	Petugas pada <i>Back Office</i> KP2KP/KPP/Kanwil DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian Pengaduan Pelayanan Perpajakan.
127	Pendaftaran Objek Pajak PBB	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Petugas pada <i>Back Office</i> KP2KP/KPP/Kanwil DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 48/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan.
128	Perubahan Data Objek Pajak PBB	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Petugas pada <i>Back Office</i> KP2KP/KPP/Kanwil DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 48/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan.
129	Permohonan Pencabutan SKT PBB	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Petugas pada <i>Back Office</i> KP2KP/KPP/Kanwil DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 48/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan.

130	Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	Petugas pada Back Office KPP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.
131	Permohonan Pemberian Imbalan Bunga	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	Petugas pada Back Office KPP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
132	Permohonan Revaluasi Aktiva Tetap Berwujud	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	Petugas pada Back Office KPP/Kanwil DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER - 37/PJ/2015 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 Dan Tahun 2016.
133	Pemberitahuan kembali pemusatan tempat PPN terutang	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	Petugas pada Back Office KP2KP/KPP/Kanwil DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2020 tentang Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Pemusatan Pajak Pertambahan Nilai Terutang.
134	Aktivasi EFIN	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP - Petugas pada back office KPP DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 s.t.d.t.d PER-06/PJ/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online.

f



135	Permintaan Data Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-Faktur)	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP - Petugas pada <i>Back Office</i> KP2KP/KPP/Kanwil DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan yang mengatur tentang Permintaan Data Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-Faktur). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER - 10/PJ/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2019 Tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan
136	Surat Keterangan WNI Memenuhi Persyaratan Menjadi Subjek Pajak Luar Negeri	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP - Petugas pada <i>Back Office</i> KP2KP/KPP/Kanwil DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: 1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2011 tentang Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri; dan 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
137	Permohonan Pengenaan Pajak Penghasilan Hanya atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh dari Indonesia	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP - Petugas pada <i>Back Office</i> KP2KP/KPP/Kanwil DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: 1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2011 tentang Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri; dan 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan



				Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
138	Penyampaian Surat Keberatan non PBB	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP - Petugas pada <i>Back Office</i> KP2KP/KPP/Kanwil DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan; dan 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Keberatan Secara Elektronik (E-Filing).
139	Hak mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP - Petugas pada <i>Back Office</i> KP2KP/KPP/Kanwil DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan; dan 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

f

140	Pendaftaran Wajib Pajak	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP - Petugas pada <i>Back Office</i> KP2KP/KPP/Kanwil DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2016 tentang Layanan Pajak di Luar Kantor di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; 3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Secara Elektronik Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum dan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Dalam Rangka Ekstensifikasi; dan 5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
141	Pelaporan SPT Tahunan PPh 1770 SS	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP - Petugas pada <i>Back Office</i> KP2KP/KPP/Kanwil DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

f

				<p>Tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya; dan</li><li>3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.</li></ol>
142	Pelaporan SPT Tahunan PPh 1770 S	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP - Petugas pada <i>Back Office</i> KP2KP/KPP/Kanwil DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;</li><li>2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 sebagaimana telah</li></ol>

f

				<p>beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya; dan</p> <p>3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.</p>
143	Pelaporan SPT Tahunan PPh 1770	<p>- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP</p>	<p>- Otomatis oleh sistem administrasi DJP</p> <p>- Petugas pada <i>Back Office</i> KP2KP/KPP/Kanwil DJP</p>	<p>Jenis dokumen mengikuti ketentuan:</p> <p>1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;</p> <p>2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-30/PJ/2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak</p>

f

				Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya; dan 3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan.
144	Perluasan Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak (OP Karyawan) (Status Pernikahan dan kebangsaan untuk Orang Pribadi)	- <i>Contact Center</i>	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP - Petugas pada <i>Back Office Contact Center</i> - Petugas pada <i>Back Office KP2KP/KPP/Kanwil DJP</i>	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; dan 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
145	Pemindahan Wajib Pajak (Orang Pribadi)	- <i>Contact Center</i>	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP - Petugas pada <i>Back Office Contact Center</i> - Petugas pada <i>Back Office KP2KP/KPP/Kanwil DJP</i>	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; dan 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
146	Pemindahan Wajib Pajak (Non Orang Pribadi)	- <i>Contact Center</i>	- Petugas pada <i>Back Office Contact Center</i>	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan

f

			- Petugas pada <i>Back Office</i> KP2KP/KPP/Kanwil DJP	Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; dan 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
147	Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak (HP, <i>email</i> , alamat OP Karyawan)	- <i>Contact Center</i>	- Petugas pada <i>Back Office Contact Center</i> - Petugas pada <i>Back Office</i> KP2KP/KPP/Kanwil DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; dan 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
148	Izin Menyelenggarakan Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Dollar Amerika Serikat (PMA, BUT)	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP - <i>Contact Center</i>	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2020 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian, Pembatalan serta Permohonan dan Penerbitan Kembali Izin Penyelenggaraan Pembukuan atau Pencatatan dengan Menggunakan Bahasa Inggris atau Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat.
149	Pemberitahuan Menyelenggarakan Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Dollar Amerika	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2020 tentang Tata Cara

	Serikat (bagi Wajib Pajak Badan Tertentu Kontrak Karya, K3S, KSO)	dengan sistem administrasi DJP - <i>Contact Center</i>		Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian, Pembatalan serta Permohonan dan Penerbitan Kembali Izin Penyelenggaraan Pembukuan atau Pencatatan dengan Menggunakan Bahasa Inggris atau Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat.
150	Pemberitahuan Menyelenggarakan Pencatatan/Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Rupiah	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP - <i>Contact Center</i>	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2020 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian, Pembatalan serta Permohonan dan Penerbitan Kembali Izin Penyelenggaraan Pembukuan atau Pencatatan dengan Menggunakan Bahasa Inggris atau Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat.
151	Pemberitahuan Tidak Memanfaatkan Izin Menyelenggarakan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dollar Amerika Serikat	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP - <i>Contact Center</i>	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2020 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian, Pembatalan serta Permohonan dan Penerbitan Kembali Izin Penyelenggaraan Pembukuan atau Pencatatan dengan Menggunakan Bahasa Inggris atau Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dolar Amerika Serikat.
152	Pemberitahuan Penggunaan Norma Penghitungan	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 54/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Melakukan Pencatatan dan Kriteria

f

		dengan sistem administrasi DJP - <i>Contact Center</i>		Tertentu serta Tata Cara Menyelenggarakan Pembukuan untuk Tujuan Perpajakan; dan 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
153	Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP - <i>Contact Center</i>	- Petugas pada <i>Back Office Contact Center</i>	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
154	Pengaktifan Kembali Wajib Pajak Non-Efektif	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP - <i>Contact Center</i>	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP - Petugas pada <i>Back Office Contact Center</i>	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; dan 3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2016 tentang Layanan Pajak di Luar Kantor di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

f



155	Penetapan Wajib Pajak Non-Efektif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP</li> <li>- <i>Contact Center</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Petugas pada <i>Back Office Contact Center</i></li> <li>- Petugas pada <i>Back Office KP2KP/KPP/Kanwil DJP</i></li> </ul>	<p>Jenis dokumen mengikuti ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;</li> <li>2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; dan</li> <li>3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2016 tentang Layanan Pajak di Luar Kantor di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.</li> </ol>
156	Pengembalian Pendahuluan bagi Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu (Pasal 17C UU KUP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP</li> <li>- <i>Contact Center</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Petugas pada <i>Back Office Contact Center</i></li> <li>- Petugas pada <i>Back Office KPP DJP</i></li> </ul>	<p>Jenis dokumen mengikuti ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;</li> <li>2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-406/PJ/2001 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-359/PJ/2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-406/PJ/2001 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;</li> <li>3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor</li> </ol>

f

				<p>209/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.; dan</p> <p>4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2021 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah dan Pelaksanaan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Terhadap Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, dan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah serta <i>Special Purpose Company</i> atau Kontrak Investasi Kolektif Sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.</p>
157	<p>Pengembalian Pendahuluan bagi Wajib Pajak Persyaratan Tertentu</p>	<p>- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP - <i>Contact Center</i></p>	<p>- Petugas pada <i>Back Office Contact Center</i> - Petugas pada <i>Back Office KPP-DJP</i></p>	<p>Jenis dokumen mengikuti ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;</li> <li>2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; dan</li> <li>3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2021 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah dan Pelaksanaan Pengembalian</li> </ol>

f

				Pendahuluan Kelebihan Pajak Terhadap Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, dan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah serta <i>Special Purpose Company</i> atau Kontrak Investasi Kolektif Sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.
158	Pengembalian Pendahuluan bagi Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah	<ul style="list-style-type: none"><li>- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP</li><li>- <i>Contact Center</i></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Petugas pada <i>Back Office Contact Center</i></li><li>- Petugas pada <i>Back Office KPP DJP</i></li></ul>	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.03/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;</li><li>2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; dan</li><li>3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2021 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah dan Pelaksanaan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Terhadap Wajib Pajak Kriteria Tertentu, Wajib Pajak Persyaratan Tertentu, dan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah serta <i>Special Purpose Company</i> atau Kontrak Investasi Kolektif Sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.</li></ol>

t

159	Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak (data express)	- Laman DJP dan/atau laman yang terintegrasi dengan sistem administrasi DJP - <i>Contact Center</i>	- Otomatis oleh sistem administrasi DJP - Petugas pada <i>Back Office Contact Center</i> - Petugas pada <i>Back Office KP2KP/KPP/Kanwil DJP</i>	Jenis dokumen mengikuti ketentuan: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak; dan 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
-----	---	--	---	---

f

B. Tata cara untuk melakukan konfirmasi atas produk pelayanan bertanda tangan elektronik yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak

1. Wajib Pajak dapat melakukan konfirmasi kebenaran produk pelayanan yang diperoleh Wajib Pajak berdasarkan Kode Verifikasi yang tercantum dalam dokumen elektronik.
2. Konfirmasi kebenaran produk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain melalui:
  - a. laman Direktorat Jenderal Pajak; atau
  - b. laman Penyelenggara Sertifikasi Elektronik instansi (<https://bsre.bssn.go.id/verifikasi> atau <https://verifikasipdf.govca.id/>).
3. Wajib Pajak mengunggah dokumen dalam bentuk *portable document format* (pdf) pada laman sebagaimana dimaksud pada huruf b angka ii dan mengikuti prosedur yang tertera pada laman tersebut.
4. Jawaban konfirmasi kebenaran sebagaimana dimaksud pada huruf b diperoleh secara otomatis di laman Direktorat Jenderal Pajak atau laman milik Penyelenggara Sertifikasi Elektronik instansi.

---

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak

u.b.

Kepala Bagian Umum,



DWI BUDI ISWAHYU

NIP 19701102 199012 1 0014